



**Politea** : Jurnal Pemikiran Politik Islam  
**P-ISSN** : 2621-0312  
**E-ISSN** : 2657-1560  
**Vol. 6, No. 1 Tahun 2023**  
**DOI** : [10.21043/politea.v6i1.19591](https://doi.org/10.21043/politea.v6i1.19591)

---

## **Perbandingan Faktor Internal dan Eksternal dalam Politik Luar Negeri Iran dan Afghanistan**

Arief Bakhtiar Darmawan  
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia  
arief.darmawan@unsoed.ac.id

Ilham Pangestu  
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia  
ilhampangestu789@gmail.com

Chika Cahyani  
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia  
chika.cahyani@mhs.unsoed.ac.id

Aurani Azalia Putri  
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia  
aurani.putri@mhs.unsoed.ac.id

### ***Abstract***

*This study aims to compare the internal and external factors that influence foreign policy of Iran and Afghanistan. In 2021, the Taliban took over the government in Afghanistan without much resistance. The Taliban is a Sunni Islamic group that has a history of implementing Islamic law at the state level. The international community is looking forward to how the country's leadership will go. Meanwhile, as an important geopolitical actor in the region, Iran is a republic based on Shiite Islam. As a more stable country, Iran may have a political system that can serve as an early example for the Taliban in leading Afghanistan. By using Holsti's theory regarding internal and external factors in foreign policy, this study will compare the factors that influence foreign policy in Iran and Afghanistan. The author uses a constructivism approach to analyze material and non-material elements as important elements in policies in Iran and Afghanistan, including Islamic elements. The author argues that the foreign policies of Iran and Afghanistan are influenced by the Islamic religion. This is reflected in various foreign policy practices, such as in foreign alliances, relations with the United States and Israel, and nuclear development.*

*Keywords: Afghanistan, comparative politics, foreign policy, Iran, Islam politics*

## **Abstract**

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi politik luar negeri Iran dan Afghanistan. Pada tahun 2021, Taliban mengambil alih pemerintahan di Afghanistan tanpa perlawanan berarti. Taliban merupakan kelompok Islam beraliran Sunni yang memiliki sejarah penerapan syariat Islam di level negara. Masyarakat internasional menantikan bagaimana kepemimpinan di negara itu berjalan. Sementara itu, sebagai aktor geopolitik penting di kawasan, Iran merupakan negara republik yang berlandaskan pada Islam beraliran Syiah. Sebagai negara yang lebih stabil, Iran bisa jadi memiliki sistem politik yang bisa menjadi contoh awal bagi Taliban dalam memimpin Afghanistan. Dengan menggunakan teori Holsti mengenai faktor internal dan eksternal dalam kebijakan luar negeri, penelitian ini akan membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri Iran dan Afghanistan. Penulis menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk menganalisis unsur material maupun non-material sebagai unsur penting dalam kebijakan di Iran dan Afghanistan, termasuk unsur Islam. Penulis berargumen bahwa politik luar negeri Iran dan Afghanistan dipengaruhi oleh agama Islam. Hal itu tercermin melalui beragam praktek kebijakan luar negeri, seperti dalam aliansi luar negeri, relasi dengan Amerika Serikat dan Israel, serta kepemilikan nuklir.

Kata kunci: Afghanistan, Iran, perbandingan politik, politik Islam, politik luar negeri

## **Pendahuluan**

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi politik luar negeri Iran dan Afghanistan. Kedua negara sama-sama memiliki sistem politik domestik berlandaskan Islam, dengan mayoritas populasi beragama Islam. Sampai pada tahun 2021, sebenarnya kedua negara tersebut sama-sama menganut sistem “republik Islam”. Namun, setelah Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Afghanistan dan Taliban berkuasa, terjadi perubahan dalam sistem politik di negara itu. Saat ini, secara lebih detail, Iran menganut republik Islam dengan Presiden sebagai pemimpin negara, sementara Afghanistan menganut keamiran Islam dengan Pemimpin Tertinggi yang memiliki status ulama sebagai pemimpin negara.

Persamaan lain dari Iran dan Afghanistan adalah besarnya peran ulama di pemerintahan. Di Iran, ulama merupakan kelas yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Dalam sejarah Iran, ulama adalah aktor penting yang berani melawan rezim sekuler, selalu berperan dalam peristiwa penting, dan bahkan berhasil memenangkan revolusi (Varol, 2016). Di Afghanistan, ulama memiliki peran sebagai aktor yang memberikan legitimasi dan saran kepada pemerintahan. Para pemimpin Taliban sendiri melihat diri mereka sebagai ulama, sehingga ulama bisa dikatakan sebagai tulang punggung pemerintahan Afghanistan (Foxley & Giustozzi, 2023).

Selain itu, Iran dan Afghanistan adalah dua negara yang sama-sama sering mendapatkan perhatian internasional. Sejak Revolusi Islam yang terjadi pada tahun 1979, Iran menjadi aktor dan kekuatan penting di kawasan Timur Tengah. Posisi geografis, sumber daya alam, serta kekuatan pengaruh yang besar menjadikan Iran sebagai negara besar yang disegani dan ditakuti (Aliyev & Ashifa, 2021). Dalam waktu yang bersamaan, Afghanistan mendapatkan sorotan karena dianggap dunia sebagai sarang organisasi terorisme yang memiliki pengaruh dan jaringan global. Karena alasan itu, Amerika Serikat (AS) melakukan invasi ke Afghanistan pada tahun 2001. Invasi tersebut menarik karena pada masa Perang Dingin, AS dan Afghanistan memiliki kedekatan militer ketika bersama-sama mengalahkan pasukan Uni Soviet.

Meskipun memiliki kesamaan, kedua negara tersebut memiliki banyak perbedaan yang cukup signifikan. Sebagai contoh, Iran lebih superior dalam bidang militer. Menurut Global Firepower (2023), Iran memiliki indeks kekuatan militer 0,2712 dan menempati urutan 17 dari 145 negara, sementara Afghanistan memiliki indeks 2,3118 dan menempati urutan 114. Secara lebih detail, Iran merupakan negara berlandaskan ajaran Islam Syiah, sementara Afghanistan berlandaskan Islam Sunni dengan karakteristik fundamental.

Dengan beberapa persamaan dan perbedaan tersebut, membandingkan politik luar negeri Iran dan Afghanistan menjadi persoalan yang relevan. Selama ini, penelitian terkait politik luar negeri Iran sering dikaitkan dengan peran agama atau identitas Islam Syiah (Aliyev & Ashifa, 2021; Wastnidge, 2020; Golgomohammadi, 2019). Penelitian terkait Taliban di Afghanistan tidak jauh berbeda, mengingat Taliban merupakan kelompok yang lekat dengan ideologi Islam fundamentalis dan dihadapkan pada pilihan demokrasi (Mawardi, Lutfirahmad, Idayanti, 2022; İNAÇ & Ashefi, 2021). Para pengamat juga menantikan mengenai apakah Afghanistan akan menjadi negara yang berpengaruh seperti Iran, ataukah semakin menjauh dari politik internasional. Penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah mengenai perbandingan faktor internal dan eksternal dalam politik luar negeri Iran dan Afghanistan, untuk kemudian menganalisis praktek atau pilihan kebijakan di lapangan. Penulis berargumen bahwa politik luar negeri Iran dan Afghanistan sangat dipengaruhi oleh ide-ide dan pandangan Islam masing-masing, serta persepsi geopolitik dan ancaman dalam hubungan internasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan politik dalam hubungan internasional untuk menganalisis rumusan masalah. Studi perbandingan politik biasanya merujuk

pada studi yang membandingkan institusi politik domestik, proses, kebijakan konflik, maupun perilaku di negara yang berbeda (Kesselman, Krieger, Joseph, 2010). Berbeda dengan itu, studi hubungan internasional tertarik dengan kejadian-kejadian dalam lingkup internasional (Landman & Robinson, 2009). Namun, dengan adanya globalisasi dan aktivitas politik yang melintasi batas negara, pendekatan perbandingan politik dapat digunakan untuk menganalisis politik domestik yang berpengaruh terhadap politik luar negeri. Dalam tulisan ini, penulis berupaya menganalisis perbandingan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan atau perilaku luar negeri Iran dan Afghanistan. Sebagai sebuah negara, Iran dan Afghanistan dibangun dari prinsip-prinsip fundamental seperti konstitusi, ideologi, bahkan pengalaman sejarah. Hal itulah yang akan memengaruhi sistem politik dan distribusi kekuatan suatu negara. Tidak hanya faktor internal, penelitian ini juga akan membandingkan faktor eksternal yang menentukan politik luar negeri Iran dan Afghanistan. Penulis menggunakan teori Holsti tentang faktor internal dan eksternal untuk menjadi dasar-dasar perbandingan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Politik Luar negeri yang dikemukakan oleh K. J Holsti. Penulis memadukannya dengan Teori Konstruktivisme untuk menjelaskan struktur kultural kolektif dan menekankan peran faktor non-material seperti persamaan agama, etnis, dan ideologi. Subjek pada penelitian ini adalah negara Iran dan Afghanistan dengan objek penelitiannya adalah pengambilan kebijakan luar negeri dari kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penulis menggunakan sumber-sumber terkait penelitian ini melalui buku, jurnal, dan artikel berita untuk memperkuat argumen yang disampaikan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data yang didapatkan sebelum akhirnya data dapat disajikan. Untuk memvalidasi data yang telah direduksi, penulis menggunakan data pustaka dari sumber-sumber yang jelas kredibilitasnya yaitu melalui kanal berita mainstream dan artikel jurnal nasional maupun internasional.

## **Hasil dan Pembahasan**

### *Teori Politik Luar Negeri dan Konstruktivisme*

Teori Politik Luar Negeri digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek perilaku (internal) dan struktural (eksternal) yang menjadi pertimbangan aktor politik dalam menentukan kebijakan luar negeri sebuah negara. K. J. Holsti (1970) menjelaskan bahwa perilaku manusia dapat

diidentifikasi melalui faktor-faktor yang disebut “ego” dan “alter”. Di sini, “ego” merupakan interpretasi dari faktor-faktor yang ada di dalam diri seorang manusia yang mempengaruhi bagaimana manusia tersebut berperilaku atau menentukan suatu keputusan. Di sisi lain, faktor “alter” merupakan interpretasi faktor luar yang memengaruhi manusia dalam berperilaku atau menentukan suatu keputusan. Kedua faktor tersebut yang dapat menyebabkan seseorang menentukan pilihan atas perannya. Di dalam politik internasional, konsep peran tersebut dapat diterapkan kepada aktor seperti negara, organisasi internasional non-negara, dan perusahaan multinasional untuk menjelaskan mengenai kerangka pemikiran dalam menentukan sebuah kebijakan. Di dalam konsep peran ini, “alter” dan “ego” merupakan variabel independen. Seorang aktor dapat berperilaku berdasarkan kedua variabel tersebut maupun hanya menekankan pada satu variabel.

Dalam analisis kebijakan luar negeri, Holsti (1970) mengemukakan empat konsep yang bisa membantu, yaitu *role performance* (yang meliputi sikap, keputusan, dan tindakan yang pemerintah ambil), *national role conceptions* (faktor internal), *role prescriptions* (faktor eksternal), dan *position* (status nasional) (lihat Tabel 1). Terkadang, negara memiliki kompleksitas yang tinggi dalam menentukan kebijakan luar negeri. Seperti contohnya adalah pada konsep status dalam politik internasional. Status di dalam politik internasional digunakan sebagai stratifikasi yang merefleksikan kekuatan yang dimiliki suatu negara berdasarkan ekonomi, militer, prestise, dan faktor pendukung lainnya. Negara-negara yang memiliki “*power*” cenderung memiliki kebebasan yang lebih tinggi dalam menentukan kebijakan luar negeri. Berbanding terbalik dengan negara yang memiliki “*power*” lebih kecil, mereka cenderung memiliki kebebasan berperilaku yang lebih sempit pada ranah politik internasional. Meskipun mereka masih bebas dalam menentukan, akan tetapi kebijakan tersebut dapat ditolak oleh aktor yang memiliki kekuatan lebih besar. Maka dari itu, status sosial juga menjadi faktor penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara.

Tabel 1. Faktor Internal dan Eksternal Menurut Holsti

<i>National role conceptions</i> (faktor internal/perilaku)	<i>Alter's role perscriptions</i> (faktor eksternal/struktural)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• lokasi geopolitik</li> <li>• sumber daya negara</li> <li>• kapabilitas</li> <li>• kebutuhan sosio-ekonomi</li> <li>• nilai nasional</li> <li>• ideologi</li> <li>• peran tradisional</li> <li>• opini publik</li> <li>• personalitas</li> <li>• kebutuhan politik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• struktur sistem</li> <li>• sistem nilai</li> <li>• prinsip legal</li> <li>• komitmen terhadap perjanjian internasional</li> <li>• pemahaman informal</li> <li>• opini dunia</li> </ul>

Sumber: Holsti (1970), dimodifikasi dalam bentuk tabel oleh Penulis (2023).

Dalam penelitian ini, penulis berupaya membandingkan faktor internal (*national role conceptions*) dan eksternal (*role perscriptions*) sesuai dengan konsepsi K. J. Holsti dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Melalui faktor-faktor tersebut, penulis juga berupaya membandingkan tindakan atau kebijakan (*role performance*) Iran dan Afghanistan.

Selain menggunakan teori Holsti, penelitian ini menggunakan pendekatan Konstruktivisme dalam menganalisis rumusan masalah. Konstruktivisme memiliki asumsi dasar bahwa manusia lebih ditentukan oleh shared ideas. Konstruktivisme melihat bahwa manusia merupakan individu yang bertindak bukan semata mata karena adanya motif tertentu, tetapi dibentuk oleh interaksi antar individu (Pramono, 2010). Konstruktivisme melihat suatu peristiwa berdasarkan pola konstruksi yang dibangun dari interaksi para aktornya, yang mana teori konstruktivisme ini melihat peristiwa secara menyeluruh dan bukan dari satu individu saja. Konstruktivisme mempunyai dasar pada nilai-nilai non material seperti moral, norma, budaya, agama, serta nilai non-material lainnya. Melalui nilai tersebut, konstruktivisme menganalisis perilaku dari suatu individu. Hal ini berbeda dengan perspektif realis yang tidak memberikan kontribusi yang cukup bagi analisis peran faktor internal dalam kebijakan suatu negara.

Karena Iran dan Afghanistan menganut ideologi Islam, rujukan dari pembuatan kebijakan luar negeri tidak jauh dari ideologi ke-Islam-an tersebut. Untuk menganalisis lebih dalam

mengenai pengaruh Islam atau politik Islam di kedua negara tersebut, Konstruktivisme menjadi teori yang relevan karena menempatkan Islam sebagai *shared value* yang dapat mendasari suatu perilaku yang dilakukan oleh suatu aktor.

### *Islam dalam Pengalaman Sejarah Iran dan Afghanistan*

Iran dan Afghanistan memiliki beberapa persamaan pengalaman sejarah, yaitu sama-sama memiliki sejarah panjang berporos Islam, memandang peran penting ulama dalam politik dan kebijakan, serta sempat dipengaruhi Uni Soviet saat Perang Dingin. Secara bersamaan, Iran dan Afghanistan memiliki beberapa detail perbedaan, diantaranya Iran memiliki sistem pemerintahan Republik Islam, sementara Afghanistan menjadi Keamiran Islam. Iran juga lekat dengan ideologi Syiah, sementara Afghanistan saat ini lebih dipengaruhi faktor kesukuan daripada ideologi karena Taliban berkuasa. Berikut ini merupakan penjelasan lebih jauh dari pengalaman sejarah Iran dan Afghanistan.

Iran memiliki sejarah yang panjang dalam hal politik dan sistem pemerintahan. Republik Islam Iran yang sekarang kita kenal ini merupakan hasil revolusi panjang semenjak pertama kali berdiri pada tahun 550 SM (Rais, 2018). Sistem pemerintahan Iran pada masa itu menganut sistem kerajaan dan dikenal sebagai Kerajaan Achaemenid. Pada tahun 331 SM, kerajaan tersebut ditaklukan oleh Alexander dari Macedonia. Kekuasaan tersebut berlangsung hingga digantikan dengan Kerajaan Safawi yang menganut paham Syiah pada tahun 1507 M. Periode tersebut menjadi titik awal di mana Iran memiliki paham Islam dalam pemerintahan. Kerajaan Safawi memiliki nama Kerajaan Persia, sebelum akhirnya berubah menjadi Iran pada tahun 1935. Kerajaan tersebut berubah kembali menjadi Republik Islam Iran pada tahun 1979 yang menandakan deklarasi negara Islam pada negara tersebut. Namun, perkembangan Iran menjadi negara Islam bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Iran sempat menjadi negara sekuler pada saat Syah Reza memimpin. Politik Iran pada masa kepemimpinan Syah sangat dipengaruhi oleh kepentingan Inggris dan Rusia, yang menyebabkan adanya westernisasi di wilayah Iran (Rais, 2018). Gejolak sekularitas sangat menonjol pada masa-masa kepemimpinan Syah Reza, sampai akhirnya muncul gerakan yang inisiasi oleh Ayatullah Rohullah Khomeini untuk meruntuhkan kekuasaan sekuler. Khomeini memulai revolusinya dengan dukungan pemerintah Prancis. Gerakan ini dihalangi oleh pemerintah Amerika Serikat setelah Khomeini berhasil menggulingkan Syah Reza dari kursi kepemimpinan (Rais, 2018). Akan tetapi, pendukung dari Khomeini

melakukan gerilya untuk memperbesar dominasi kelompok Khomeini. Gerakan tersebut ternyata berdampak positif dan membuat Khomeini berhasil menguasai Iran. Dengan diangkatnya Khomeini sebagai penguasa Iran, menjadi penanda dimulainya Iran secara resmi menjadi negara Islam. Keputusan ini dihasilkan melalui referendum yang digelar pada bulan Maret 1979 dengan 98,27% masyarakat Iran setuju untuk menjadikan Iran sebagai negara Republik Islam (Kadir, 2015).

Setelah masa revolusi tersebut, Iran memiliki sistem kekuasaan sendiri yang disebut *Wilayat al-Faqih*. Sistem ini merupakan sistem gabungan yang memiliki landasan Syiah Imamiyah dengan konsep demokrasi di dalam pemerintahan. Dalam sistem kekuasaan tersebut, Allah SWT merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, dengan pemegang kekuasaan penuh pada Imam Mahdi yang sekarang diyakini dalam masa ghaib. Selama masa ghaib tersebut berlangsung, tugas dari Imam Mahdi dijalankan oleh Wali Fakih, dengan seorang fakih yang memegang kekuasaan tertinggi yang dinamakan Rahbar (Kadir, 2015). Demokrasi dalam Iran diimplementasikan dengan adanya *trias politica* yang dianut dalam pemerintahan Iran. Kekuasaan legislatif dipegang oleh tiga lembaga, yaitu Majeles Shura-e Islami, Dewan Perwakilan (*Shiriya Nighaban*), dan Majelis Ahli (*Majelse-e Khubreqan*). Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden yang masih berada di bawah kekuasaan Rahbar.

Afghanistan juga memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan ke-Islam-an. Pada awalnya, sistem negara yang dianut oleh Afghanistan adalah monarki absolut yang dipimpin oleh seorang raja. Ulama memiliki derajat yang tinggi karena adanya pengaruh Islam yang besar di dalam masyarakat Afghanistan. Ulama sering mengambil andil untuk menentukan kebijakan yang keluar dari pemerintahan negara tersebut. Ulama atau yang biasa disebut mullah bahkan diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan persoalan sengketa hukum di tengah masyarakat. Sayangnya, dengan dasar politik Islam yang kuat di Afghanistan, masih belum dapat mengendalikan konflik yang sering terjadi di sana. Konflik perebutan kekuasaan masih menjadi peristiwa yang sering terjadi di Afghanistan. Hal ini terjadi karena masyarakat Afghanistan masih memiliki tingkat kesukuan yang sangat tinggi, yang mengakibatkan nasionalisme dari masyarakat negara tersebut bercampur dengan rasa kesukuan yang sangat tinggi.

Konflik di Afghanistan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pola perilaku masyarakat. Pengaruh dari luar juga membawa Afghanistan menjadi negara yang sering berkonflik, dimulai

dari Raja Zhahir Syah (1973) yang dianggap sebagai “boneka” Uni Soviet dengan wewenang untuk melakukan revolusi kebudayaan (Fanami & Andri, 2021). Revolusi tersebut merupakan salah satu agenda Uni Soviet untuk menyebarkan paham komunis di wilayah Afghanistan. Akan tetapi, revolusi tersebut melahirkan kontroversi yang menyebabkan adanya penolakan dari masyarakat Islam terhadap agenda tersebut. Di sebuah konferensi Rakyat di Afghanistan, pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyerang jilbab. Mereka menginginkan penghapusan jilbab sebagai bentuk revolusi budaya (Azria & Ramayani, 2022). Tentu saja hal ini mendapat penolakan keras dari masyarakat khususnya masyarakat Kandahar. Buntut kejadian ini adalah konflik yang terjadi antara gerakan Islam dengan pemerintah yang mengirim pasukan bersenjata ke daerah Kandahar untuk memaksa kaum wanita Islam melepas hijabnya. Konflik yang disebabkan karena pengaruh dari luar tidak hanya selesai di situ. Uni Soviet masih terus menyetir pemerintahan Afghanistan dan membuat gerakan Islam menjadi hancur pada masa kepemimpinan Muhammad Daud dengan menangkap Gulam Niazi dan Sayyaf. Pemerintahan komunis ini terus berlanjut hingga akhirnya muncul gerakan Mujahidin pada waktu pemerintahan Muhammad Taraki yang menghancurkan dominasi paham tersebut dari wilayah Afghanistan.

Dengan latar belakang sejarahnya dalam melawan paham komunis, gerakan Islam menjadi gerakan yang sangat berkembang untuk melawan paham tersebut. Salah satu gerakan Islam yang memiliki basis massa dan militer yang kuat di Afghanistan adalah Taliban (Fanami & Andri, 2021). Secara harfiah, Taliban berarti sekumpulan pelajar yang sedang menuntut ilmu agama. Taliban membagikan pahamnya melalui madrasah-madrasah yang didirikan di provinsi Kandahar. Mayoritas anggota kelompok Taliban berasal dari suku Pustun, salah satu suku terbesar di Afghanistan. Taliban yang berkembang sangat pesat, dapat mengusir mujahidin hanya dengan dua tahun masa perkembangannya, serta melanjutkan invasi kekuasaannya pada kota lain seperti kota Herat, Mezar-e, dan Kunduz. Pada akhirnya, Taliban menguasai 90% dari wilayah Afghanistan, sebelum akhirnya digempur oleh tentara Amerika Serikat pada tahun 2001 karena dituduh sebagai gerakan terorisme.

Kehadiran Taliban yang kembali berkuasa pada tahun 2021 membawa dimensi baru bagi pemerintahan Afghanistan. Pimpinan tertinggi di Afghanistan adalah Mawlawi Haibatullah Akhundzada, yang sejak tahun 2016 telah menjabat sebagai pemimpin Taliban (BBC, 2021). Pemimpin Afghanistan memiliki relasi yang kuat dengan ulama. Selain sebagai pemimpin atau

pejabat pemerintah, mereka menganggap diri mereka sebagai ulama. Pada tahun 2022, dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 3000 ulama laki-laki, Akhundzada menegaskan bahwa Afghanistan adalah negara yang independen dan tidak bisa didikte oleh negara lain (Ritchie & Akbarzai, 2022). Menurut Akhundzada, sikap independen merupakan kunci kemajuan negara. Keberhasilan jihad Afghanistan, masih menurut klaim Akhundzada, telah menjadi sumber kebanggaan Afghanistan dan umat Islam di seluruh dunia.

### *Hasil Perbandingan Faktor Internal dalam Politik Luar Negeri Iran dan Afghanistan*

Ada empat indikator yang digunakan penulis dalam menjelaskan hasil perbandingan faktor internal pada penerapan politik luar negeri yang dilakukan oleh Iran dan Afghanistan. Keempat indikator tersebut antara lain: struktur pemerintahan, peran ulama dalam pengambilan keputusan, ideologi yang dianut, dan legitimasi publik kepada pemerintah yang berdaulat. Pada aspek pemerintahannya, Iran memiliki bentuk pemerintahan yang unik. Iran memilih bentuk demokrasi dengan menyesuaikan syariat Islam Syiah di dalam pola pemerintahannya. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Iran menggunakan asas *Trias Politica* di dalam sistem pemerintahannya. Meskipun begitu, kekuasaan tertinggi tidaklah dipegang oleh Presiden atau Perdana Menteri seperti pada negara demokrasi lain. Di Iran, kedaulatan tertinggi dipegang oleh Allah SWT dengan kekuasaan tertingginya ada pada Imam Mahdi, yang dipercaya masih dalam masa goib (Kadir, 2015). Karena masih dalam masa ghoib, pemerintahan diwakili oleh Wilayah al Faqih. Wilayah al Faqih ini juga disebut dengan Rahbar. Peran dari Wilayah Al Faqih di sistem pemerintahan Iran lebih besar dibanding peran presiden dalam mengatur negara. Di sini, presiden hanya memiliki wewenang dalam penerapan UUD dan memimpin lembaga eksekutif, itu pun hanya pada hal-hal yang tidak diperintah secara langsung oleh Faqih (Rohmah, 2019). Selain itu, terdapat beberapa penyesuaian lagi pada sistem pemerintahannya seperti adanya Pemimpin Agung yang bertanggung jawab pada kebijakan-kebijakan umum. Pemimpin Agung juga merupakan Ketua Pasukan Bersenjata dan Badan Intelejen Iran. Sementara pada kekuasaan legislatif, terdapat penyesuaian dengan adanya lembaga yang bernama *Majelis Shura-e Islami*. Pada prinsipnya, lembaga tersebut merupakan lembaga pembuat undang-undang, akan tetapi dalam prakteknya *Majelis Shura-e Islami* harus berpatokan pada dalil-dalil Syiah dalam membuat

kebijakan. Lembaga tersebut tidak boleh membuat undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syiah (Rohmah, 2019).

Adanya perbedaan konsep pemerintahan dengan negara lain, membuat arah kebijakan luar negeri Iran pun berbeda. Seperti contohnya adalah pada wewenang untuk menangani urusan luar negeri. Di negara lain, Kementerian Luar Negeri memiliki wewenang penuh atas urusan Luar Negeri suatu negara. Sementara di Iran, terdapat lembaga lain yang langsung mengurus sendiri urusan luar negeri seperti contohnya Tentara Penjaga Revolusioner. Instansi memiliki wewenang untuk berperan aktif dalam mengarahkan relasi antar-negara (Aliyev & Ashifa, 2021). Represi dari peran dari Kementerian Luar Negeri bertambah dengan adanya Rahbar yang mengintervensi kebijakan luar negeri baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, Rahbar mengintervensi melalui pidato yang disampaikan kepada publik yang ditujukan secara verbal maupun tertulis untuk mengatur suatu subordinat. Secara tidak langsung, Rahbar mengintervensi instansi-instansi yang langsung berhubungan dengan pihak luar seperti Dewan Keamanan Nasional dan Tentara Penjaga Revolusioner. Rahbar memiliki wewenang untuk mengambil kontrol secara langsung institusi-institusi tersebut (Aliyev & Ashifa, 2021).

Dari segi ideologi, Syiah memegang peran yang besar dalam struktur pemerintahan Iran. Syiah juga berperan sangat penting dalam menentukan kebijakan domestik negara tersebut. Kebijakan luar negeri Iran juga terpengaruh dari Syiah sebagai ideologinya, meskipun pada prakteknya Iran masih menggunakan bahasa universal dalam berdialog di dalam dunia politik internasional dengan tidak terlalu menunjukkan bahwa sekte resmi di Iran adalah Syiah (Aliyev & Ashifa, 2021). Pada wilayah regional negara-negara Teluk Basra, dapat dikatakan bahwa Iran merupakan negara dengan sumber daya yang besar serta memiliki kekuatan politik dan militer yang besar. Dengan besarnya pengaruh Syiah pada warga negara Iran, akan mempengaruhi perilaku dari Iran dalam menyikapi situasi geopolitik di wilayah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan sikap yang signifikan terhadap negara penganut Syiah di sekitarnya (Aliyev & Ashifa, 2021). Iran sebagai negara Islam juga cenderung memberikan respon yang positif terhadap negara Islam lainnya. Seperti contohnya pada saat pertemuan tiga negara antar Iran, Suriah, dan Indonesia, Iran menginginkan adanya kerja sama untuk dapat membantu meraih kemerdekaan Palestina. Dengan pengambilan kebijakan tersebut, Iran dapat memantik negara-negara muslim lainnya untuk melawan Israel (Roshandel & Lean, 2011).

Dari aspek legitimasi publik, sebenarnya Iran selalu menghadapi ancaman krisis legitimasi setelah masa revolusi Iran (Roy, 1999). Legitimasi politik yang selalu berdasarkan pada dukungan masyarakat akan menghadapi masalah apabila demokrasi tidak berjalan sesuai dengan keinginan Wilayah Al-Faqih. Hingga saat ini, presiden Iran dipilih dengan cara demokrasi melalui pemilihan umum, akan tetapi Wilayah Al-Faqih memiliki kuasa untuk tidak menyetujui hasil akhir dari pemilihan umum. Apabila kandidat terpilih dari presiden Iran merupakan kandidat yang tidak disetujui oleh Wilayah Al-Faqih, maka akan mengikis legitimasi politik dari pemerintah Iran. Situasi ekonomi dan sosial Iran selalu mengancam legitimasi politik dari pemerintahannya (Roy,1999). Seperti contohnya pada tahun 2019, terjadi demonstrasi dari masyarakat Iran akibat adanya kenaikan harga BBM yang drastis (Chatham House, 2019). Gelombang demonstrasi tersebut merupakan gelombang demonstrasi keempat sejak tahun 1999. Protes tersebut semakin merusak legitimasi politik dari pemerintahan Iran. Terbukti dengan sikap apatis yang ditunjukkan oleh masyarakat Iran. Pada tahun 2019, suara untuk pemilihan kota Taheran hanya mencapai ambang batas 9%. Pemerintah Iran bahkan sampai mengurangi batas suara dari 25% menjadi 20% untuk mengantisipasi hasil pemilihan suara pada pemilihan presiden Iran selanjutnya (Chatham House, 2019).

Sementara itu, pemerintahan Afghanistan saat ini dipegang kembali oleh Taliban, tepat setelah Amerika Serikat menarik pasukannya dari negara tersebut. Bentuk pemerintahan Afghanistan berubah dari bentuk Demokrasi menjadi bentuk Keamiran Islam. Saat ini, Amir Hibatullah Akhundzada menjadi pemimpin tertinggi Afghanistan dengan Mohammad Hassan Akhnud yang diangkat sebagai Perdana Menteri negara tersebut. Dia merupakan Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri selama Taliban berkuasa pada periode tahun 1996-2001. Kembalinya rezim Taliban ke kursi pemerintahan Afghanistan membawa kebijakan politik masa lalu yang berpotensi mengancam hak-hak warga negara Afghanistan, termasuk kebijakan sipil dan wanita. Terdapat represi terhadap jurnalis dengan mengancam kebebasan persnya sehingga lebih dari dua ratus organisasi berita di Afghanistan ditutup (Foxley & Giustozzi, 2023). Selain itu, wanita di Afghanistan tidak memiliki kebebasan seperti pria, seperti tidak boleh bersekolah atau tidak boleh belajar dan mengajar di universitas. Pemerintah juga menghindarkan wanita dari bekerja. Amnesty Internasional melaporkan bahwa ada kenaikan angka penangkapan wanita oleh pihak kepolisian karena melanggar kebijakan yang mendiskriminasi perempuan seperti, tidak memperbolehkan wanita untuk muncul ke publik tanpa didampingi oleh suaminya. Selain

perubahan pada politik domestik, Taliban juga mengubah pandangan politik internasional beberapa negara. Selama di akuisisi oleh militer Amerika Serikat, Afghanistan sangat bergantung pada bantuan dari berbagai negara untuk menutup 75% anggaran belanja publik (Maizland, 2023). Kembalinya Taliban ke kursi pemerintahan menyebabkan beberapa negara membekukan bantuannya kepada pemerintah Taliban, yang bisa meruntuhkan ekonomi Afghanistan dan dapat memicu konflik baru (OECD, 2012). Selain pembekuan bantuan, ada beberapa reaksi lain, yaitu penutupan kantor diplomat di berbagai negara dan sanksi internasional (Maizland, 2023).

Di dalam pemerintahan Afghanistan saat ini, ulama memiliki peran yang cukup strategis. Taliban sebagai aktor yang memiliki kedudukan di pemerintahan cenderung tidak mau menerima saran dari pihak luar. Legitimasi dari ulama lebih menjadi prioritas untuk mengarahkan kebijakan pemerintah. Meskipun ulama menjadi aktor yang memberikan legitimasi di dalam pemerintahan negara tersebut, bukan berarti ada homogenitas ulama di dalam pemerintahan. Terdapat beberapa kalangan ulama dari golongan Sunni dan Syiah, seperti Salafi, Ikhwanul Muslimin, dan golongan Sufi yang memiliki porsi pengaruhnya masing-masing (Foxley & Guistozzi, 2023). Besarnya pengaruh ulama kepada pemerintah ini dipengaruhi oleh aliansi politik tokoh ulama dengan Taliban, koneksi pribadi dengan Taliban (suku, geografis, keluarga, dan bisnis), serta kekuatan pribadi yang berasal dari dukungan massa. Selain faktor-faktor tersebut, pandangan ulama mengenai politik internasional juga berdampak pada seberapa besar ulama tersebut dapat memengaruhi kebijakan pemerintah Afghanistan. Hal ini terjadi karena Taliban cenderung mengabaikan ulama-ulama yang memiliki pemikiran moderat dan tertarik untuk terlibat dalam komunitas Internasional (Foxley & Guistozzi). Hal tersebut menyulitkan Afghanistan untuk berkomunikasi dengan aktor internasional. Ekosistem pemerintahan seperti itu juga membuat Afghanistan sulit untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain yang sebelumnya tidak ada afiliasi dengan Taliban.

Pada saat AS mengintervensi Afghanistan, pemerintah menggunakan model demokrasi pada sistem pemerintahannya, sehingga pemilu diadakan untuk memilih presiden yang akan memimpin. Akan tetapi, sering terjadi beberapa penyimpangan pada prakteknya. Seperti contohnya di beberapa pemilu yang telah diselenggarakan, para kandidat sering menggunakan metode “curang” seperti penyuapan, pengancaman, dan jual beli suara agar bisa mendapatkan suara terbanyak. Meskipun begitu, pemerintahan yang ada masih dianggap sah. Praktek demokrasi

diperparah pada saat pemilu 2014 ketika pemerintah Afghanistan menolak untuk mengumumkan hasil pemilihan yang menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Bahkan, turunnya PBB untuk menghitung ulang suara masih belum bisa membuat pemerintah Afghanistan untuk mengumumkan hasil pemilu ke publik (Larson & Coburn, 2017). Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa sebenarnya legitimasi publik dari masyarakat tidak terlalu berpengaruh pada pemerintahan Afghanistan. Kembalinya Taliban ke kursi pemerintahan juga semakin memperburuk legitimasi publik karena model pemerintahan dan ideologi yang dianut berbeda. Pemerintahan Afghanistan berubah menjadi Keamiran, ideologi yang dianut juga berubah menjadi ideologi Islam dengan berlandaskan dalil-dalil Sunni Hanafi (Foxley & Giustozzi, 2023). Tidak heran bahwa kebijakan yang diambil oleh Afghanistan sudah tidak berlandaskan pada demokrasi. Perilaku politik internasional Afghanistan juga menjadi lebih tertutup karena ideologi konservatif yang dianutnya.

### *Hasil Perbandingan Faktor Eksternal dalam Politik Luar Negeri Iran dan Afghanistan*

Untuk menjelaskan hasil pada faktor eksternal, terdapat dua faktor eksternal yang memengaruhi politik luar negeri Iran dan Afghanistan. Pertama, persepsi ancaman dalam arena internasional. Ancaman merupakan segala hal yang dapat menyebabkan kerugian atau menciptakan konsekuensi negatif lainnya bagi orang lain, terutama untuk memberikan tekanan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu ataupun mencegahnya untuk melakukan sesuatu. Ancaman dikonstruksi secara sosial di dalam dan di antara percakapan yang bersifat pribadi maupun non-pribadi para ahli, pemimpin politik, dan publik (Meyer, 2009). Sementara itu, pemahaman akan makna ancaman sendiri dimediasi oleh persepsi target. Persepsi adalah dasar untuk mengetahui dan memahami serta menjadi motivasi untuk bertindak. Keadaan emosional, pemrosesan informasi, dan pola inferensi dan atribusi adalah fundamen dalam proses persepsi (Stein, 2013). Persepsi ancaman adalah bagaimana individu dan pemerintah mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan mereka. Persepsi ancaman juga dapat membentuk kebijakan dalam negeri suatu negara. Persepsi ancaman dalam arena internasional dibentuk oleh beberapa faktor kunci, yaitu kemampuan militer, ideologi dan intensi, sengketa wilayah, dan kepentingan ekonomi.

Persepsi ancaman Iran dalam arena internasional dibentuk oleh kombinasi faktor ekonomi, militer, ideologi, dan budaya. Iran melihat dirinya sebagai kekuatan regional utama yang tunduk

pada tekanan dan intervensi eksternal. Di saat yang bersamaan, Iran berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan keamanannya melalui kombinasi sarana diplomatik, ekonomi, dan militer. Sementara itu, persepsi ancaman Taliban dan Afghanistan dalam arena internasional dibentuk oleh sejarah konflik dan ketidakamanan, serta keyakinan ideologis dan agama mereka. Mereka melihat diri mereka berjuang melawan pendudukan dan campur tangan asing, mempertahankan tradisi budaya dan agama, dan berusaha mempertahankan kemerdekaan dan keamanan dalam situasi geopolitik Timur Tengah yang menantang.

Faktor eksternal kedua adalah geopolitik di kawasan. Membahas mengenai ancaman dalam arena internasional, Timur Tengah memiliki keterkaitan yang erat sebagai kawasan yang kompleks dan bergejolak dengan sejarah konflik geopolitik yang panjang yang menyiratkan diversifikasi aktor dan isu-isu. Timur Tengah bukan sekadar istilah wilayah geografis belaka, penyebutannya merujuk kepada konsep geopolitik yang dikonstruksi Barat dan sekutunya (Ruslin, 2013). Perpecahan yang tumpang tindih telah membentuk geopolitik Timur Tengah dan memproyeksikan ketidakstabilan terhadap Afrika Utara: Arab melawan non-Arab, Sunni melawan Syiah, pro-Barat melawan anti-Barat, dan pendukung status quo melawan kekuatan revisionis (Colombo dan Lecha, 2021). Perombakan geopolitik yang sedang berlangsung di Timur Tengah memang menimbulkan persaingan kekuatan antara kekuatan regional dan global, negara dan aktor non-negara, tetapi perombakan tersebut juga melahirkan kerja sama baru. Timur Tengah terlahir dari koalisi antara sejumlah negara Barat dengan kekuatan politik lokal, menjadi titik pertemuan berbagai kepentingan nasional yang membuatnya menjadi *hot spot* selama puluhan tahun lamanya. Terdapat beberapa tren geopolitik yang saat ini membentuk masa depan Timur Tengah, yaitu penataan kembali aktor-aktor berpengaruh; kerapuhan negara; proliferasi kekerasan aktor non-negara; kebangkitan persaingan Iran-Saudi; dan dampak politik dari pergeseran pola perdagangan energi global (Kausch, 2015). Dengan pengaduan upaya diplomatik, kerja sama yang signifikan di antara negara-negara yang terlibat, dan dukungan dari masyarakat internasional, penyelesaian persoalan yang terjadi di Timur Tengah dapat dilakukan.

Geopolitik Timur Tengah dan persepsi ancaman dalam arena internasional merupakan dua faktor eksternal yang memengaruhi politik luar negeri Iran dan Afghanistan. Dalam dasawarsa terakhir, Iran merupakan salah satu aktor kunci dari turbulensi yang terjadi di Timur Tengah. Sejak revolusi 1979 dan munculnya Republik Islam, kebijakan luar negeri Iran telah diselimuti oleh

ideologi revolusioner Islamis anti-Imperialis yang menjadi salah satu dari banyak sumber kekuatan di Iran yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya serta memperluas pengaruh regional Iran dengan menantang sistem internasional. Namun, kebijakan luar negeri Iran tersebut membuat penduduknya mengalami kesulitan ekonomi, ketidakamanan, dan isolasi global (Sadjadpour dan Taleblu, 2015). Selama periode ini, para pemimpin Iran telah menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pendekatan ideologis dan geopolitik mereka terhadap kebijakan luar negeri. Secara bertahap, kepemimpinan Iran mulai menekankan faktor geopolitik dalam kebijakan luar negerinya, bahkan kini, faktor geopolitik mendominasi corak kebijakan luar negeri Iran. Alasan utama faktor geopolitik mendominasi dalam pengelolaan hubungan Iran dengan negara-negara regional lainnya adalah sifat permasalahan yang dialami Iran saat ini dalam konteks politik dan keamanan dicirikan oleh berbagai sumber ketidakamanan. Kondisi tersebut mengharuskan Iran untuk membangun koalisi strategis (Barzegar, 2009).

Sama seperti Iran, faktor geopolitik juga menjadi salah satu faktor penting dalam sikap kebijakan luar negeri Afghanistan. Penjagaan kemerdekaan nasional, integritas teritorial, dan persatuan nasional menjadi fokus Afghanistan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya mengingat ruang geopolitiknya. Afghanistan hanya memiliki sedikit kendali atas kebijakan luar negerinya karena geopolitik yang sebagian besar didikte oleh Raj Inggris dan rezim tsar Rusia pada abad ke-18 dan ke-19 (Asey, 2018). Perspektif Taliban sebagai penguasa Afghanistan terhadap geopolitik didorong oleh keyakinan ideologis dan agama, serta pengalaman historis perlawanan Taliban terhadap kekuatan asing. Taliban melihat diri mereka sebagai bagian dari jihad global melawan AS dan sekutunya. Dalam geopolitik regional, Taliban berusaha menjalin hubungan baik dengan gerakan dan pemerintah Islam lainnya di dunia Muslim, termasuk Iran, Pakistan, dan Arab Saudi. Mereka juga berusaha menjaga hubungan baik dengan China dan Rusia yang dinilai sebagai sekutu potensial untuk melawan AS dan sekutunya.

Tabel 2. Perbandingan Faktor Internal dan Eksternal dalam Politik Luar Negeri Iran dan Afghanistan

	Iran	Afghanistan
<b>Faktor Internal</b>		
Sumber daya negara: struktur pemerintahan	<i>Wilayat al-faqih</i> : demokrasi dengan syariat Islam Syiah	Keamiran Islam
Personalitas: peran ulama	Strategis: ulama dalam Rahbar memiliki wewenang lebih tinggi daripada presiden	Strategis: pemimpin pemerintahan adalah para ulama
Ideologi: pandangan terhadap Barat	Masih bersedia bekerja sama, tidak menonjolkan Islam Syiah	Sulit berkomunikasi dengan Barat karena menolak demokrasi
Opini publik: legitimasi publik	Legitimasi publik rendah, banyak yang apatis	Legitimasi publik rendah, kekuasaan tidak didapat melalui pemilu
<b>Faktor Eksternal</b>		
Struktur sistem: geopolitik kawasan	Kekuatan regional utama	Negara yang berjuang melawan pendudukan dan campur tangan asing
Pemahaman informal: persepsi ancaman dalam arena internasional	Adanya tekanan dan intervensi eksternal, terutama soal nuklir	Perlawanan terhadap AS dan sekutunya sebagai bentuk jihad global

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023).

Pada tabel 2 di atas, terdapat kesamaan pada faktor internal yang menonjol pada kedua negara tersebut. Pada struktur pemerintahan, Iran memiliki struktur yang hampir sama dengan Afghanistan karena keduanya sama sama menjadikan ulama sebagai pemegang wewenang tertinggi pada pemerintahannya. Iran dipimpin oleh seorang Rahbar dan Afghanistan dipimpin oleh seorang Amir. Hal ini mengindikasikan bahwa peran ulama masih sangat penting meskipun dari kedua tersebut memiliki ideologi yang berbeda. Pada aspek ideologi, Iran masih dapat bekerja sama dengan negara barat meskipun menganut nilainya sendiri. Berbeda dengan Afghanistan yang masih sulit untuk membuka diri masuk ke dalam politik internasional. Pada tabel tersebut, diperlihatkan juga bahwa legitimasi Iran masih rendah meskipun Iran menggunakan sistem pemilu untuk menentukan presiden. Berbeda dengan Afghanistan yang legitimasi publiknya rendah karena tidak adanya sarana seperti pemilu yang diadakan di negara tersebut. Pada faktor ekstenal,

dapat dilihat bahwa Iran berperan penting pada struktur geopolitik timur tengah, sedangkan Afghanistan masih berfokus pada kedaulatan negaranya sendiri. Iran juga sudah memiliki power yang cukup untuk tidak mengacuhkan tekanan eksternal terutama soal nuklir dari negara barat. Sedangkan Afghanistan melakukan perlawanan dalam bentuk jihad global sebagai respon dari tekanan yang diberikan.

### *Perilaku Politik Luar Negeri Iran dan Afghanistan*

Faktor eksternal dan internal tersebut menghasilkan perilaku politik luar negeri yang berbeda di kawasan. Penulis berupaya membahas setidaknya dalam dua hal. Pertama, relasi Iran dan Afghanistan dengan dua negara yang sering terlibat dalam konflik kawasan, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Dinamika Iran, Amerika Serikat, dan Israel memiliki pola relasi yang serupa, tetapi tetap ada unsur distingtif karena Iran dan Israel yang notabene terlibat secara langsung ke dalam politik regional. Lain halnya dengan relasi antara Afghanistan, Amerika Serikat, dan Israel yang berbeda karena Afghanistan sampai saat ini tidak mengakui kemerdekaan Israel dan keduanya juga tidak berusaha untuk membangun hubungan diplomatik. Kedua, pandangan terhadap kepemilikan nuklir.

*Pertama, relasi Iran-AS dan Iran-Israel, serta Afghanistan-AS dan Afghanistan-Israel.* Dinamika hubungan Iran dan Amerika Serikat merupakan suatu kemelut yang berasal dari serangkaian kejadian pasca Revolusi Iran pada tahun 1979. Peristiwa monumental tersebut seolah berperan sebagai sebuah titik balik yang menjadikan arah identitas nasional Iran lebih definit, yakni yang sebelumnya bertendensi ke arah Barat melalui pimpinan Reza Pahlavi, kemudian menjadi negara republik teokratis yang implementasinya masif hingga saat ini. Tipikal konflik di antara Iran dan Amerika Serikat sejatinya bukan berbentuk peperangan secara langsung melainkan berupa penjatuhan sanksi-sanksi terhadap nuklir, minyak, dan gas; pemberian titel-titel berciri stigma seperti "*United States as The Great Satan*" oleh Ayatullah Khomeini atau *IRGC* sebagai *Foreign Terrorist Organization (FTO)* oleh Donald Trump; dan tindakan saling menekan melalui politik dengan negara-negara lainnya di kawasan Timur Tengah. Relasi Iran dengan Amerika Serikat kian menegang karena adanya *clash of interest*, salah satunya ketika Arab Spring terjadi dimana Iran melalui keyakinan '*Islamic Awakening*'-nya bertindak proaktif dalam mengumandangkan prinsip-prinsip Islam dan mendukung orang-orang Arab yang terkena operasi (Hussain, 2015). Alur hubungan di antara keduanya kemudian memanas karena peristiwa

pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani yang menstimulasi Iran untuk melakukan serangan balasan dan semakin meningkatkan pengayaan uranium tanpa mengindahkan peringatan restriksi nuklir.

Menilik dari sisi lainnya, Iran dan Amerika Serikat sempat beberapa kali melakukan interaksi yang berkonotasi *nonhostile* seperti kolaborasi nuklir *Atoms for Peace Program*, perjanjian nuklir *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*, dan koordinasi tindakan untuk bersama-sama menangani permasalahan Al-Qaeda pasca peristiwa 9/11. Keduanya memutuskan untuk menanggihkan ketegangan mereka demi menghadapi Taliban sebagai musuh bersama yang dianggap menyediakan tempat perlindungan bagi Al-Qaeda di Afghanistan. Bentuk kerja sama dalam problematika tersebut pun sampai pada *Bonn Agreement (2001)* atau perjanjian repatriasi para pengungsi di Afghanistan.

Sementara mengenai relasi Iran dan Israel memiliki skema yang hampir sama dalam bagaimana Iran berdinamika dengan AS, yakni melalui pola relasi yang bermula dari koeksistensi untuk kemudian berkembang menjadi antagonisme pasca-Revolusi Iran. Sebagai sesama negara Timur Tengah, Iran dan Israel sempat membangun hubungan bilateral yang cukup baik terutama di tengah-tengah pergolakan politik regional dan Perang Dingin. Pada tahun 1950-an, Israel yang notabene terkena boikot oleh negara-negara Arab pada akhirnya mencari alternatif sumber daya minyak melalui Iran dengan timbal balik berupa perluasan pasar hingga ke kawasan Eropa. Ketika perang dengan Irak berlangsung, Israel menjual persenjataan kepada Iran yang sebagian besar dibayar dengan komoditas minyak (Maher, 2020). Iran dan Israel menjalin kooperasi komprehensif dengan mengikutsertakan bidang politik, ekonomi, dan keamanan untuk mentransformasikan Iran menjadi negara maju yang modern. Sementara bagi Israel, Iran merupakan aliansi yang penting terutama sebagai penyuplai komoditas minyak.

Bagaimanapun juga, hubungan Iran dan Israel tetap berubah secara signifikan seiring arah identitas Iran pasca revolusi yang semakin solid. Khomeini menganggap bahwa Israel mengancam independensi dan integritas negaranya yang kukuh terhadap Islam dengan terlalu mencampuri urusan internal. Ketegangan hubungan di antara keduanya kemudian bereskalasi menjadi *shadow war* melalui negara-negara aliansi di kawasan Timur Tengah. Iran mengusung strategi pengepungan dengan meningkatkan koordinasi pertahanan dari berbagai arah perbatasan Israel, yakni melalui Jalur Gaza, Lebanon Selatan, Suriah Selatan, Yaman, dan Irak Barat (Furlan, 2022).

Sebagai balasan, Israel menantang hegemoni proksi Iran di Timur Tengah dengan mengadakan *peace agreement* bersama Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan sekaligus memperkuat pangkalan-pangkalan militer dan menonjolkan kualitas *Israeli Air Force (IAF)*.

Untuk kasus Afghanistan-AS, dua dekade invasi AS terhadap Afghanistan pada akhirnya usai dengan penarikan pasukan militer Amerika Serikat. Taliban secara *de facto* berkedudukan sebagai pengisi kekuasaan. Konflik ini memberikan dampak ekstensif terutama bagi kedua negara yang terlibat secara langsung mulai dari ribuan korban jiwa, kerugian materi, hingga dinamika perpolitikan baik internal maupun eksternal. Kehadiran Amerika Serikat di Afghanistan adalah bentuk tindakan preventif atas risiko meluasnya ancaman terorisme yang seakan diakomodasi oleh Taliban dengan melindungi kelompok-kelompok Islam ekstremis. Alhasil, Afghanistan dan Amerika Serikat sepakat untuk menjalin kerja sama bilateral melalui *Strategic Partnership Agreement* pada tahun 2012 yang digadang-gadang dapat meningkatkan kedaulatan, memperbaiki ketidakstabilan, dan meningkatkan kualitas tata kehidupan penduduk Afghanistan. Salah satu implementasinya adalah upaya demokratisasi Afghanistan melalui mediasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Ghani dan Abdullah selalu pemimpin guna membentuk pemerintahan kesatuan sekaligus mencegah terjadinya perang sipil (Yusufzai, 2018).

Dengan Israel, kedua negara tersebut sama-sama berada dalam kawasan Timur Tengah dan terlibat secara langsung dengan Amerika Serikat. Namun demikian, kenyataannya baik Afghanistan maupun Israel sama-sama tidak memberikan jawaban yang pasti terkait potensi menjalin relasi dengan satu sama lain. Afghanistan memang tidak memiliki hubungan diplomatik apa pun dengan Israel. Di sisi lain, negara tersebut juga tidak mengakui kemerdekaan Israel sejak tahun 1948. Akan tetapi, apabila mengkaji dengan lebih jauh lagi maka akan tampak bahwa ada pemetaan pengaruh secara tidak langsung Afghanistan terhadap Israel. Mengikuti keberhasilan Taliban dalam menguasai Afghanistan, euforia yang ditimbulkan turut mendorong semangat jihad para kelompok Islam ekstremis lainnya seperti *Palestinian Islamic Jihad (PIJ)* dan Hamas dalam memerangi Israel pada konflik tak berkesudahan dengan Palestina (Michael & Guzansky, 2021).

*Perilaku kedua yang memperlihatkan politik luar negeri Iran dan Afghanistan adalah persepsi tentang kepemilikan nuklir. Cikal bakal program nuklir milik Iran berawal dari Atoms for Peace Program pada tahun 1950-an yang diprakarsai bersama dengan Amerika Serikat sebagai bentuk edukasi dan kolaborasi program nuklir. Walaupun hubungan keduanya berbalik menjadi*

perselisihan pasca revolusi, Iran tetap melancarkan pengayaan uranium serta pengoperasian reaktor dan kamp-kamp nuklir. Tindakan tersebut mengundang perhatian negara-negara lain yang kemudian terus berusaha mengawasi dan membatasi program nuklir Iran melalui sanksi-sanksi dan perjanjian-perjanjian, salah satunya adalah JCPOA. Namun demikian, pengunduran diri Amerika Serikat dari perjanjian tersebut pada tahun 2018 semakin mendorong Iran untuk gencar menumpuk uranium melebihi limitasi 3.6% sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam JCPOA. Para ahli nonproliferasi mengatakan bahwa Iran telah melakukan pengayaan uranium sampai 60% yang setidaknya cukup untuk menciptakan satu senjata nuklir (Gambrell, 2023).

Khomeini mengatakan bahwa Iran tidak berupaya untuk memperoleh senjata nuklir karena fatwa Islam sama sekali tidak mendukung hal tersebut. Mayoritas negara-negara muslim di dunia pun turut menentang program nuklir Iran yang dibuktikan melalui sebuah penelitian oleh aktor nonpartisan dengan rincian sebagai berikut: persentase pertentangan Mesir terhadap program nuklir Iran mencapai angka 66%, Lebanon sebesar 64%, Turki sebesar 63%, dan Indonesia sebesar 60% (Pew Research Center, 2010). Menanggapi fakta bahwa program nuklir mereka yang masih saja terlaksana di tengah-tengah pertentangan dan tekanan dari banyak entitas internasional, Iran berdalih jika hal ini hanyalah untuk keperluan perdamaian dan bentuk pertahanan diri.

Sementara itu, Afghanistan masuk ke dalam kategori negara yang tidak memiliki senjata nuklir serta sedang tidak menggarapnya. Namun demikian, hal tersebut tidak membuat Afghanistan terlepas dari dilematik nuklir karena negara sahabatnya, Pakistan, memiliki persenjataan nuklir yang cukup mumpuni lengkap dengan fasilitas-fasilitas untuk melakukan pengayaan dan penelitian saintifik. Benang merah terlihat dari kekhawatiran Pakistan akan kapabilitas nuklirnya yang terancam jika mengingat bahwa Taliban kini muncul sepenuhnya sebagai pengisi kekuasaan Afghanistan. Potensi risiko ancaman terhadap nuklirnya kian meningkat karena Taliban yang belum mencapai stabilitas pemerintahan ditakutkan dapat memicu destabilisasi Pakistan. Terlebih lagi, kemenangan Taliban atas Amerika Serikat di Afghanistan seolah-olah menyuntik euforia kelompok-kelompok ekstremis Islam lainnya yang sangat mungkin untuk memanfaatkan momentum dan menguasai kepemilikan nuklir Pakistan demi perjuangan jihad mereka (Sethi, 2021).

Ekuasi nuklir dengan Iran dan Afghanistan dalam kontekstual agama Islam kenyataannya tidak serta-merta memproyeksikan bahwa kepemilikan nuklir adalah suatu kompetensi yang ideal

dan baik esensinya bagi kemaslahatan Islam. Adapun selain bertentangan dengan fatwa Islam, senjata nuklir juga memicu kekhawatiran negara-negara di dunia dan menciptakan ketegangan relasi antara satu sama lain. Akan tetapi, di sisi yang berlawanan, kehadiran senjata nuklir justru dapat berperan sebagai kartu AS bagi kelompok Islam ekstremis yang mempunyai animo bulat untuk mencapai tujuannya dengan cara apa pun. Dengan demikian, senjata nuklir yang dianggap sebagai sebuah kekuatan menakutkan oleh kaca mata dunia, yang ironisnya justru dapat berperan sebagai pertahanan diri di tengah-tengah perpolitikan global yang bergolak.

Tabel 3. Perbandingan Implementasi Politik Luar Negeri Islam Iran dan Afghanistan

	<b>Iran</b>	<b>Afghanistan</b>
Peran Geopolitik Regional	Bertindak proaktif di dalam politik timur tengah dengan mengumandangkan <i>Islamic Awakening</i> dan prinsip-prinsip islam untuk mendukung orang-orang arab yang terkena opresi pada saat Arab Spring	Afghanistan masih berfokus kepada pembebasan negaranya dari invasi AS yang telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade
Relasi dengan AS dan Israel	Terdapat <i>clash of interest</i> antara Iran dengan AS dan Israel khususnya pada masa pasca revolusi sehingga meningkatkan ketegangan di antara kedua negara tersebut	Afghanistan tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel akan tetapi ada kecenderungan dari kelompok ekstrimis islam Afghanistan untuk ikut serta memerangi Israel dalam konfliknya dengan Palestina
Kepemilikan nuklir sebagai unsur politik luar negeri	Melalui program pengayaan uraniumnya, Iran telah dapat membangun senjata nuklir meskipun adanya penolakan dari negara timur tengah lainnya	Afghanistan tidak memiliki fasilitas nuklir di negaranya. Akan tetapi, euforia islam ekstrimis Afghanistan yang baru merdeka dapat memicu momentum kelompok ekstremis Pakistan untuk menguasai kepemilikan nuklir di negaranya.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023).

Seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, Iran dan Afghanistan memiliki posisi yang berbeda di dalam politik regional Timur Tengah. Iran telah dapat berperan proaktif sejak peristiwa *Arab Spring* sedangkan Afghanistan masih berfokus pada politik negaranya sendiri. Keduanya juga memiliki posisi yang berbeda dalam relasinya dengan Amerika Serikat dan Israel. Afghanistan

memiliki hubungan yang lebih sentimental dengan AS karena sejarah Afghanistan yang diduduki oleh AS semenjak kebijakan *Global War On Terrorism* digaungkan oleh AS. Sementara itu, konflik kepentingan Iran berfokus pada permasalahan nuklir. Pada posisinya menghadapi Israel, keduanya sama-sama menentang berdirinya negara Israel. Untuk aspek nuklir itu sendiri, Iran telah mampu mendirikan fasilitas nuklir sendiri, sedangkan Afghanistan memiliki kekuatan (*power*) dalam menyebarkan ideologi untuk memengaruhi kepemilikan nuklir di Pakistan.

## **Kesimpulan**

Iran dan Afghanistan merupakan dua negara Islam yang memiliki kesamaan dan perbedaan dalam faktor internal dan eksternal yang memengaruhi politik luar negeri. Dalam faktor internal, ulama Iran dan Afghanistan sama-sama memiliki peran strategis karena mengisi jabatan penting dalam struktur pemerintahan. Kedua negara juga memiliki legitimasi publik yang rendah. Dalam faktor eksternal, Iran memiliki persepsi dan telah menunjukkan diri sebagai kekuatan geopolitik dunia. Sementara Afghanistan memiliki persepsi sebagai negara yang berjuang melawan pendudukan dan campur tangan asing, termasuk kekhawatiran soal demokrasi.

Dengan faktor-faktor tersebut, Iran memiliki politik luar negeri yang cenderung berani melawan opini AS dan Israel, dan tetap mempertahankan diri dengan pengembangan nuklirnya. Di saat yang bersamaan, Afghanistan masih berada dalam tahap menyusun kekuatan domestik yang rapuh karena berupaya mempertahankan diri dengan nilai-nilai Islam dan enggan menerima nilai-nilai demokrasi dari Barat. Meski hal itu akan membuat Afghanistan berada dalam kesulitan ekonomi, tapi persepsi yang kuat mengenai negara yang merdeka dan tidak mau ada campur tangan asing membuat negara tersebut belum menunjukkan tanda-tanda menyesuaikan diri dengan opini internasional.

## Referensi

- Aliyev, Anar & Ashifa, Dr. Km. (2021). Internal and External Factors Determining Foreign Policy of Iran: Prospects and Perspectives. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(3), 1158-1167.
- Asey, Tamim. (2018). "Afghanistan's Enigmatic Foreign Policy." *Smallwarsjournal.com*. <https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/afghanistans-enigmatic-foreign-policy#:~:text=Throughout%20its%20history%20%E2%80%93%20Afghanistan%20has%20had%20little>
- Azria, K., & Ramayani, E. (2022). Sejarah Perang Afghanistan Dari Dulu Hingga Kini. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 6(2), 122-137.
- Barzegar, Kayhan. (2009). "The Geopolitical Factor in Iran's Foreign Policy." *Middle East Institute*. <https://www.mei.edu/publications/geopolitical-factor-irans-foreign-policy>.
- BBC. (2021, 7 September). "Afghanistan: Who's who in the Taliban leadership." <https://www.bbc.com/news/world-asia-58235639>
- Colombo, S., & Soler i Lecha, E. (2021). Europe and the "New" Middle East. *Journal of Balkan and near Eastern Studies*, 23(3), 403–422. <https://doi.org/10.1080/19448953.2021.1888246>.
- Fanani, M. F., & Andri, A. (2021). Sejarah Islam dan Politik di Afghanistan. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 21(2), 91-112.
- Felbab-Brown, V. (2023, February 3). "Afghanistan in 2023: Taliban internal power struggles and militancy." *Brookings*. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2023/02/03/afghanistan-in-2023-taliban-internal-power-struggles-and-militancy/>
- Foxley, Tim & Giustozzi, Antonio. (2023, 26 Januari). "A Force of Moderation or Radicalisation? The Role of Afghanistan's Ulema." *The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*. <https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/force-moderation-or-radicalisation-role-afghanistans-ulema>
- Furlan, M. (2022) Israeli-Iranian relations: past friendship, current hostility. *Israel Affairs*.
- Gambrell, J. (2023). "Iran has enough enriched uranium to build 'several' nuclear weapons, UN says." *PBS*. <https://www.google.com/amp/s/www.pbs.org/newshour/amp/world/iran-could-build-several-nuclear-weapons-un-says>
- Global Firepower. (2023). "Comparison of Iran and Afghanistan Military Strengths (2023)." <https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=iran&country2=afghanistan>
- Golmohammadi, Vali. (2019). The Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: Prospects for Change and Continuity. *All Azimuth*, 8(1), 93-102.

- Hussain, N. (2015). US-Iran Relations: Issues, Challenges and Prospects. *Pluto Journals: Policy Perspectives*.
- Holsti, K. J. (1970). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 14(3), 233-309. doi:10.2307/3013584
- İNAÇ, Hüsamettin & Asefi, Jawid. (2021). The Discussion of Political Islam and Democracy in Afghanistan. *Ulusam Türkiye Politik Çalışmalar Dergisi*, 1(1). 1-12.
- Isaloo, A. (2017). Power, legitimacy and the public sphere: the Iranian ta'ziyeh theatre ritual. Routledge.
- Kadir, A. (2015). Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran. *Jurnal Politik Profetik*, 3(1), 1-15.
- Kausch, K. (2015). *Geopolitics and democracy in the Middle East*. FRIDE.
- Kesselman, M., Krieger, J., & Joseph, W. A. (2010). Introducing Comparative Politics. Dalam M. Kesselma, Joel Krieger, William A. Joseph, *Introduction to Comparative Politics: Political Challenges and Changing Agendas*, 1-43. Boston: Wadsworth.
- Kotokey, A., & Borthakur, A. (2021). The Ideological Trajectory within the Taliban Movement in Afghanistan. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 15(2), 205–219. <https://doi.org/10.1080/25765949.2021.1928415>
- Landman, Todd & Robinson, Neil. (2009). *The SAGE Handbook of Comparative Politics*. New York: Sage Publications, Inc.
- Larson, A., & Coburn, N. (2017). *Afghan Views of Government and Elections*. United States Institute of Peace.
- Maher, N. (2020). Balancing deterrence: Iran-Israel relations in a turbulent Middle East. Review of Economics and Political Science. <https://doi.org/10.1108/REPS-06-2019-0085>
- Mahmood, S. (2012). Religious Freedom, the Minority Question, and Geopolitics in the Middle East. *Comparative Studies in Society and History*, 54(2), 418–446. <https://doi.org/10.1017/s0010417512000096>.
- Maizland, L. (2023, 19 Januari). “The Taliban in Afghanistan.” *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/background/taliban-afghanistan>
- Mawardi, I., Lutfirahman, L., & Idayanti, U. N. (2022). Politik Kekerasan Taliban Di Afghanistan: Telaah Historis-Sosiologis Perspektif Weberian. *Jurnal Tapis*, 18(2), 39-59.
- Meyer, Christoph O. (2009) International Terrorism as a Force of Homogenization?: A Constructivist Approach to Understanding Cross-National Threat Perceptions and Responses. *Cambridge Review of International Affairs*, 22(4), 647–666.

- Michael, K., & Guzansky, Y. (2021). How Afghanistan Influences Hamas, PIJ, and Iran in their Approach to Israel. *The Washington Institute for Near East Policy*. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/how-afghanistan-influences-hamas-pij-and-iran-their-approach-israel>
- Mutawally, A. F. (2022). Perkembangan Pendidikan di Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001). *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 7(2), 165-178.
- Pew Research Center. (2010). "Iran and Its Nuclear Weapons Program." <https://www.pewresearch.org/global/2010/06/17/chapter-4-iran-and-its-nuclear-weapons-program/>
- Pramono, S., & Purwono, A. (2010). Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik. *SPEKTRUM*, 7(2), 14-20
- Rais, M. (2018). Sejarah Perkembangan Islam di Iran. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 273-288.
- Ritchie, Hannah & Akbarzai, Sahar. (2022, 2 Juli). "Taliban supreme leader warns foreigners not to interfere in Afghanistan." *CNN*. <https://edition.cnn.com/2022/07/02/asia/taliban-supreme-leader-warning-intl/index.html>
- Roshandel, J., & Lean, N. C. (2011). Iran, Israel, and the United States: Regime Security vs. Political Legitimacy: Regime Security vs. Political Legitimacy. *ABC-CLIO*.
- Roy, O. (1999). The crisis of religious legitimacy in Iran. *The Middle East Journal*, 201-216.
- Ruslin, I. T. (2013). Memetakan Konflik di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik). *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), . <https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a4>
- Sadjadpour, K., & Taleblu, B. (2015). "Iran in the Middle East: leveraging chaos." [https://www.files.ethz.ch/isn/191161/Iran%20in%20the%20Middle%20East\\_%20leveraging%20chao.pdf#:~:text=Iran%20has%20been%20the%20most%20effective%20country%20at.](https://www.files.ethz.ch/isn/191161/Iran%20in%20the%20Middle%20East_%20leveraging%20chao.pdf#:~:text=Iran%20has%20been%20the%20most%20effective%20country%20at.)
- Sethi, M. (2021). "Taliban in Afghanistan and Growing Nuclear Risks in Pakistan – What’s the Connection?" *APLN*. from [https://www.apln.network/news/member\\_activities/taliban-in-afghanistan-and-growing-nuclear-risks-in-pakistan-whats-the-connection](https://www.apln.network/news/member_activities/taliban-in-afghanistan-and-growing-nuclear-risks-in-pakistan-whats-the-connection).
- Shine, S. (2021). "Iran towards 2021 -Challenges and Opportunities." [https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2021/02/IranMonograph\\_e-11-16.pdf](https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2021/02/IranMonograph_e-11-16.pdf)
- Stein, J. G. (2013). Threat Perception in International Relations. In *Oxford Handbooks Online*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199760107.013.0012>.

- Vakil, S. (2019, December 5). "As Parliamentary Elections Loom, the Legitimacy of Iran's Regime Has Been Shaken." *Chatham House*.  
<https://www.chathamhouse.org/2019/12/parliamentary-elections-loom-legitimacy-irans-regime-has-been-shaken>
- Varol, Fatih, (2016). The Politics of Ulama: Understanding the Role of the Ulama in Iran. *Milel ve Nihal*, 13(2), 129-152.
- Wastnidge, Edward. (2020). Iran's Shia Diplomacy: Religious Identity and Foreign Policy in the Islamic Republic. Georgetown University: Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs, Brookings Institution.
- Yusufzai, R. (2018). 16 Years of US Presence in Afghanistan: Objectives, Strategies and Emerging Scenario. *Pluto Journals: Policy Perspectives*.